



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 12323-12333

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Diterminasi Etika Profesional Auditor terhadap Kualitas Review Laporan Keuangan di Inspektorat Kabupaten Pinrang

Syamsuri Rahim, Nur Wahyuni, Nurhaswita

Universitas Muslim Indonesia

syamsuri.rahim@umi.ac.id, nur.wahyuni@umi.ac.id, haswita06898@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the professional ethics of auditors on the quality of financial report reviews at the Pinrang Regency Inspectorate. Data for this study were obtained using qualitative methods from employees of the Pinrang Regency Inspectorate in 2026, who agreed to participate as respondents. This study used primary data through direct field research, administering questionnaires/statement sheets to respondents, and using a census method. Due to the small sample size, the sample was the entire population, as the population consisted of only 37 auditors. Data analysis techniques were descriptive statistics and Partial Least Squares (PLS). The results showed that integrity had a positive and significant effect on financial report reviews. Objectivity had a positive and significant effect on financial report reviews. Competence had a positive and significant effect on financial report reviews. Auditor confidentiality had a positive and significant effect on financial report reviews. Professional behavior also had a positive and significant effect on financial report reviews. This indicates that the better the integrity, objectivity, competence, auditor confidentiality, and professional behavior of government internal supervisory officials, the better the quality of the resulting financial report reviews. Thus, these factors are essential elements in supporting an objective, professional, and standard-compliant financial report review process.

Keywords: Integrity, Objectivity, Competence and Confidentiality, Professional Conduct, Financial Report Review Quality

1. Latar Belakang

Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Publik menuntut keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik memerlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan.

Reformasi pengelolaan keuangan daerah menuntut terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah adalah penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang andal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk menjamin kualitas LKPD sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diperlukan proses review laporan keuangan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Daerah, (Santoso, T. M. M. 2024).

Inspektorat Kabupaten Pinrang, yang memiliki peran strategis dalam mengawal kualitas LKPD. Temuan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal yaitu tentang pemisahan aset tanah dan jalan. Juga masalah serius yang terjadi dilapangan berkaitan dengan masyarakat yang luput dari pengawasan Inspektorat. Sehingga secara pragmatis dapat dikatakan Laporan Hasil Review (LHR) masih jauh dari kualitas yang diharapkan. Baik tidaknya kualitas review tergambar dari ada tidaknya koreksi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap angka-angka yang tertuang dalam laporan keuangan hasil review. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas review LKPD tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku auditor, khususnya etika profesional auditor, independensi, dan tekanan waktu.

Diterminasi Etika Profesional Auditor terhadap Kualitas Review Laporan Keuangan di Inspektorat Kabupaten Pinrang

Sesuai dengan pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa Standar Audit disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah, serta berdasarkan pasal 8 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) bahwa Komite Standar Audit bertugas untuk merumuskan dan mengembangkan standar audit yang salah satunya membahas mengenai kode etik, (Charendra, I. M. 2017).

Salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas review adalah etika profesional auditor. Etika profesional berfungsi sebagai pedoman perilaku auditor dalam menjaga integritas, objektivitas, kompetensi, serta tanggung jawab profesional. Auditor yang menjunjung tinggi etika profesional akan melaksanakan proses review secara cermat, jujur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa etika profesional auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan maupun review laporan keuangan, karena etika menjadi landasan moral dalam pengambilan keputusan profesional. (Kanita, N. P. S., 2025).

Kualitas review laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh sistem dan prosedur, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor individu auditor itu sendiri. Auditor dituntut memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya agar mampu bersikap jujur dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak tertentu. Selain itu, objektivitas diperlukan agar auditor dapat memberikan penilaian secara independen dan tidak bias terhadap temuan yang ada, (Subiyantoro, S. 2025).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kompetensi auditor, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman kerja. Auditor yang kompeten akan lebih mampu memahami standar akuntansi pemerintahan, mendeteksi kesalahan material, serta memberikan rekomendasi yang tepat. Di sisi lain, auditor juga wajib menjaga kerahasiaan informasi, mengingat data keuangan pemerintah bersifat sensitif dan tidak boleh disalahgunakan. Selain itu, perilaku profesional auditor mencerminkan sikap tanggung jawab, kepatuhan terhadap kode etik, serta komitmen terhadap kualitas pekerjaan. Auditor yang berperilaku profesional akan menjalankan tugas secara disiplin, teliti, dan menjunjung tinggi etika profesi, sehingga hasil review yang dihasilkan dapat dipercaya.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tekanan waktu. Inspektorat Kabupaten Pinrang dituntut untuk menyelesaikan review LKPD dalam jangka waktu yang terbatas, terutama karena review dilakukan secara paralel dengan proses penyusunan laporan keuangan. Tekanan waktu ini dapat berdampak ganda. Di satu sisi, tekanan waktu yang berlebihan berpotensi menurunkan kualitas review karena auditor cenderung mengabaikan prosedur tertentu. Namun di sisi lain, tekanan waktu yang terkelola dengan baik dapat meningkatkan fokus, efisiensi, dan kedisiplinan auditor sehingga mendorong peningkatan kualitas review. Perbedaan temuan dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh tekanan waktu terhadap kualitas review masih bersifat inkonsisten dan menarik untuk diteliti lebih lanjut, (Dewi, & Rubianti, 2025).

2. Metode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode analisis statistik dengan menggunakan SPSS 26.0. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.

1. Uji Statistik Deskriptif

Informasi data yang disediakan oleh statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata, standar deviasi, varians, maksimum, minimum, kuantitas, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2009). Statistik deskriptif merupakan suatu cara untuk mempelajari cara mengumpulkan dan menyajikan data agar dapat dipahami dengan mudah (Hasan, 2004). Untuk mengelompokkan rata-rata jawaban responden digunakan interval kategori sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{jawaban kelas}} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

2. Uji Kualitas Data

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakainya dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan (*reliability*) dan

tingkat keabsahan (*validity*) yang tinggi. Oleh karena itu, terlebih dahulu kuesioner harus diuji keandaian dan keabsahannya.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya suatu kuesioner sebagai suatu instrumen penelitian. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Sunyoto, 2011). Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode korelasi *product moment pearson* yang kemudian dibandingkan dengan r tabel. Nilai r tabel diperoleh dari $\text{degree of freedom} = n - k$, di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Apabila nilai korelasinya lebih besar dari r tabel, maka pernyataan tersebut dianggap valid. Jika nilai korelasinya lebih kecil dari nilai r tabel, maka pernyataan dianggap tidak valid dan harus dikeluarkan dari pengujian.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel yang diteliti (Sunyoto, 2011). Pertanyaan dalam kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Uji reliabilitas pengukuran dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *cronbach's alpha* dengan bantuan software SPSS 26.0. Koefisien *cronbach's alpha* yang lebih dari nilai r tabel disebut reliabel. Ada juga yang berpendapat reliabel jika *cronbach alpha* $> 0,60$ (Sunyoto, 2011) Nilai *cronbach's alpha* yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya.

c. Uji Asumsi Klasik

Model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi klasik. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk menghindari perolehan yang bias. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

d. Uji Normalitas

Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Sunyoto, 2011). Uji ini bertujuan untuk menguji apakah ada variabel pengganggu atau variabel residual dalam model regresi. Uji normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik dan uji *one-sample Kolmogorov-smirnov*. Pengambilan keputusan dengan analisis grafik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normal *probability plot*. Uji normal *probability plot* dikatakan berdistribusi normal jika garis data riII mengikuti garis diagonal dan cara ini dianggap lebih handal daripada grafik histogram karena cara ini membandingkan data riII dengan data distribusi normal (Sunyoto, 2011). Sementara untuk uji *Kolmogorov-Smirnov* dikatakan berdistribusi normal jika *asymptotic significant* data lebih besar daripada 0.05 ($p > 0.05$) (Sufren, 2013).

e. Uji Multikolinieritas

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk analisis regresi berganda yang terdiri dari minimal dua variabel bebas, di mana akan diukur tingkat asosiasi (keeratn) hubungan atau pengaruh antarvariabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Dalam menentukan terjadinya multikolinieritas dapat digunakan cara sebagai berikut :

- 1) Jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0.6.
- 2) Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik.
- 3) Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat.

Salah satu cara untuk menguji multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai tolerance harus di antara 0,0 – 1 atau tidak kurang dari 0,1, sementara untuk VIF nilainya harus lebih rendah dari angka 10 (Sufren, 2013). Semakin tinggi nilai VIF maka semakin rendah tolerance.

f. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama terjadi heteroskedastisitas. Hasil yang diharapkan

terjadi adalah homoskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang-geombang. Sementara homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka nol) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur.

g. Uji Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah suatu proporsi atau tanggapan yang sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau solusi atas persoalan. Sebelum diuji, maka suatu data terlebih dahulu harus dikuantitatifkan. Pengujian hipotesis statistik adalah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis dari data yang sedang diuji (Sunnyoto, 2011). Dalam penelitian analisis yang akan digunakan yaitu analisis dengan regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur hubungan atau tingkat asosiasi antara variabel variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan, persamaannya sebagai berikut (Sunnyoto, 2011):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kualitas Review Laporan Keuangan

α = konstanta

X1 = Integritas Auditor

X2 = Objektivitas

X3 = Kompetensi

X4 = Kerahasiaan

X5 = Perilaku Profesional

β_1 - β_5 = Koefisien regresi yang akan dihitung

ϵ = Faktor pengganggu atau error term

Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik dan uji Koefisien Determinasi (R^2). Untuk menguji hipotesis dengan uji statistik mengenai pengaruh integritas auditor, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan dan perilaku profesional terhadap kualitas review laporan keuangan di Inspektorat Kabupaten Pinrang yang baik digunakan dua bentuk pengujian hipotesis yakni secara parsial dengan uji t.

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar presentase sumbangan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji ini dilihat dari seberapa besar variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variabel dependen.

b. Uji Parsial (uji t)

Statistik uji t digunakan untuk menguji secara sendiri-sendiri hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) (Sugiyono, 2019). Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut:

- 1) $H_0: \beta = 0$, integritas auditor, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan dan perilaku profesional tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas review laporan keuangan.
- 2) $H_a: \beta \neq 0$, integritas auditor, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan dan perilaku profesional berpengaruh secara parsial terhadap kualitas review laporan keuangan.

Untuk mencari t tabel dihitung dengan $df = n - k - 1$, di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Taraf nyata 5 % dapat dilihat dengan menggunakan tabel statistik. Nilai t tabel dapat dilihat dengan menggunakan tabel t. Dasar pengambilan keputusan adalah.

- 1) Jika t hitung $>$ t tabel, maka H_a diterima dan H_0 ditolak
- 2) Jika t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga dilakukan berdasarkan probabilitas.

- 1) Jika probabilitas > tingkat signifikan, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.
- 2) Jika probabilitas < tingkat signifikan, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Peneliti menggunakan statistik deskriptif dalam penelitian ini untuk memberikan informasi mengenai gambaran atau detesis variabel dalam penelitian. Detesis data diperoleh dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari variabel Integritas (X1), Objektivitas (X2), Kompetensi (X3), Kerahasiaan (X4), Perilaku Profesional (X5) dan Kualitas Review Laporan Keuangan (Y).

Tabel Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Integritas	37	2.22	5.00	4.2102	.74295
Objektivitas	37	2.50	5.00	4.0946	.78362
Kompetensi	37	2.00	5.00	4.2973	.67102
Kerahasiaan	37	2.80	5.00	4.1405	.80673
Perilaku Profesional	37	2.86	5.00	4.1931	.71920
Kualitas Review Laporan Keuangan	37	3.00	5.00	4.3514	.59936
Valid N (listwise)	37				

Sumber: Data Diolah dengan SPSS 26, 2026

Tabel ini menjelaskan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain

- 1) Integritas (X1)
Berdasarkan tabel 8 diatas X_1 memiliki nilai minimum 2,22 nilai maksimum 5, dan *mean* 4,2102 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,74295.
- 2) Objektivitas (X2)
Berdasarkan tabel 8 diatas X_2 memiliki nilai minimum 2,50 nilai maksimum 5, dan *mean* 4,0946 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,78362.
- 3) Kompetensi (X3)
Berdasarkan tabel 8 diatas X_3 memiliki nilai minimum 2,00 nilai maksimum 5, dan *mean* 4.2973 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,67102.
- 4) Kerahasiaan (X4)
Berdasarkan tabel 8 diatas X_4 memiliki nilai minimum 2,80 nilai maksimum 5, dan *mean* 4,1405 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,80673.
- 5) Perilaku Profesional (X5)
Berdasarkan tabel 8 diatas X_5 memiliki nilai minimum 2,86 nilai maksimum 5, dan *mean* 4.1931 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,71920.

6) Kualitas Review Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan tabel 8 di atas Y memiliki nilai minimum 3,00 nilai maksimum 5, dan mean 4,3514 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,59936.

Pembahasan

1. Pengaruh Integritas terhadap Kualitas Review Laporan Keuangan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Review Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat integritas yang dimiliki oleh aparatur pengawas internal pemerintah, maka semakin baik pula kualitas pelaksanaan review laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, peningkatan integritas auditor atau aparat pengawas akan mendorong pelaksanaan proses review laporan keuangan yang lebih objektif, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator dominan yang mempengaruhi integritas adalah sikap konsisten dan komitmen. Sikap konsisten menunjukkan kemampuan aparatur pengawas untuk tetap berpegang pada prinsip, aturan, serta standar pemeriksaan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Aparatur yang memiliki sikap konsisten akan melaksanakan proses review laporan keuangan secara profesional, tidak mudah terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan tertentu, serta tetap menjaga objektivitas dalam menilai laporan keuangan. Dalam konteks Inspektorat Kabupaten Pinrang, sikap konsisten dan komitmen yang dimiliki oleh aparatur pengawas internal sangat berperan dalam meningkatkan kualitas review laporan keuangan daerah. Aparatur yang memiliki integritas tinggi akan menjalankan tugasnya secara profesional, mematuhi kode etik, serta berani menyampaikan hasil review secara objektif.

Integritas auditor merupakan sikap jujur, berpegang teguh pada nilai moral, konsisten antara ucapan dan tindakan, serta berani menyampaikan kebenaran berdasarkan fakta dan bukti pemeriksaan (Mulyadi, 2014). Integritas menuntut auditor untuk tidak berkompromi terhadap penyimpangan meskipun menghadapi tekanan dari pihak tertentu. Dalam lingkungan pemerintahan, integritas memiliki dimensi yang lebih luas karena auditor tidak hanya bertanggung jawab kepada organisasi, tetapi juga kepada publik sebagai pemilik dana negara.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan Teori Pengharapan (*Expectancy Theory*) yang menjelaskan bahwa individu akan termotivasi untuk bekerja secara optimal apabila meyakini bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang baik dan membawa hasil yang bernilai. Auditor yang memiliki integritas tinggi cenderung memiliki motivasi intrinsik untuk mempertahankan reputasi profesional dan kepercayaan organisasi, sehingga terdorong untuk menghasilkan review laporan keuangan yang berkualitas/

2. Pengaruh Objektivitas terhadap Kualitas Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Objektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Review Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat objektivitas yang dimiliki oleh aparat pengawas internal pemerintah, maka semakin baik pula kualitas pelaksanaan review laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, objektivitas yang tinggi akan mendorong aparatur pengawas untuk melakukan penilaian laporan keuangan secara adil, independen, dan berdasarkan bukti yang memadai.

Dalam konteks Inspektorat Kabupaten Pinrang, objektivitas aparatur pengawas sangat penting dalam memastikan bahwa proses review laporan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Aparatur pengawas yang memiliki objektivitas tinggi akan melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada standar pemeriksaan yang berlaku, menggunakan bukti yang relevan dan memadai, serta menyampaikan hasil review secara jujur dan profesional.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator dominan yang mempengaruhi objektivitas adalah bebas dari konflik kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aparat pengawas untuk menjaga independensi dan tidak terlibat dalam kepentingan tertentu merupakan faktor utama dalam meningkatkan objektivitas dalam melakukan review laporan keuangan. Aparatur pengawas yang bebas dari konflik kepentingan akan lebih mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak terpengaruh oleh hubungan pribadi, tekanan organisasi, maupun kepentingan lain yang dapat mempengaruhi penilaian terhadap laporan keuangan.

3. Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Review Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki oleh aparat pengawas internal pemerintah, maka semakin baik pula kualitas pelaksanaan review laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian, peningkatan kompetensi aparatur pengawas akan mendukung pelaksanaan proses review laporan keuangan secara lebih profesional, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam konteks Inspektorat Kabupaten Pinrang, kompetensi aparatur pengawas sangat berperan dalam memastikan bahwa proses review laporan keuangan dilakukan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aparatur yang memiliki kompetensi tinggi akan lebih mampu menganalisis laporan keuangan, mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kompetensi auditor mencakup pengetahuan teknis, keterampilan analitis, pengalaman kerja, serta pelatihan berkelanjutan yang diperoleh selama menjalankan tugas. Auditor yang kompeten memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kesalahan pencatatan, mendeteksi potensi penyimpangan, serta memberikan rekomendasi yang relevan dan dapat diimplementasikan. Sebaliknya, auditor dengan tingkat kompetensi rendah cenderung mengalami kesulitan dalam memahami kompleksitas laporan keuangan, sehingga hasil review yang dihasilkan kurang akurat dan tidak optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator dominan yang mempengaruhi Kompetensi adalah Kemampuan (*skill*). Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan yang dimiliki oleh aparatur pengawas merupakan faktor utama dalam meningkatkan kompetensi dalam melakukan review laporan keuangan. Kemampuan tersebut meliputi keterampilan dalam menganalisis laporan keuangan, memahami prosedur pemeriksaan, mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, serta menyusun rekomendasi perbaikan secara tepat.

Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan Teori Keagenan (Agency Theory) yang menyatakan bahwa kualitas hubungan antara principal dan agent sangat ditentukan oleh kapabilitas agent dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Dalam konteks ini, auditor sebagai agent dituntut memiliki kompetensi yang memadai agar mampu melindungi kepentingan principal, yaitu masyarakat dan pemerintah daerah. Kompetensi menjadi faktor kunci yang memastikan bahwa auditor dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan mencegah terjadinya asimetri informasi yang merugikan principal.

Secara empiris, hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu maupun penelitian terbaru di bidang auditing sektor publik. Penelitian oleh Alim (2025) menemukan bahwa kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya, penelitian Sukriah (2022) juga membuktikan bahwa auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai mampu menghasilkan pemeriksaan yang lebih berkualitas. Penelitian-penelitian terbaru di lingkungan pemerintahan daerah menunjukkan bahwa rendahnya kompetensi auditor sering menjadi salah satu penyebab lemahnya kualitas pengawasan internal.

4. Pengaruh Kerahasiaan Auditor terhadap Kualitas Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Kerahasiaan Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Review Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik auditor dalam menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan, maka semakin baik pula kualitas pelaksanaan review laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian, kerahasiaan auditor menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga profesionalisme dan kredibilitas proses review laporan keuangan.

Kerahasiaan auditor memiliki peran yang sangat penting dalam membangun hubungan kepercayaan antara auditor dengan pihak yang diaudit. Auditor yang mampu menjaga kerahasiaan akan memperoleh akses informasi yang lebih lengkap, terbuka, dan jujur dari entitas yang diperiksa. Sebaliknya, apabila auditor tidak dapat menjaga kerahasiaan, maka pihak yang diaudit cenderung menutup informasi atau memberikan data yang tidak sepenuhnya akurat, sehingga proses review menjadi tidak optimal dan hasil pemeriksaan menjadi kurang berkualitas.

Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan Teori Pengharapan (*Expectancy Theory*) yang menjelaskan bahwa individu akan termotivasi untuk menjaga perilaku tertentu apabila meyakini bahwa perilaku tersebut akan menghasilkan hasil yang bernilai. Auditor menjaga kerahasiaan informasi karena meyakini bahwa sikap tersebut akan meningkatkan reputasi profesional, kepercayaan pimpinan, serta citra organisasi. Keyakinan ini mendorong auditor untuk bersikap lebih hati-hati dalam mengelola informasi, sehingga kualitas review yang dihasilkan menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator dominan yang mempengaruhi kerahasiaan auditor adalah penggunaan informasi hanya untuk kepentingan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang mampu menjaga dan memanfaatkan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan secara profesional akan lebih mampu menjaga prinsip kerahasiaan. Auditor dituntut untuk tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh selama proses review laporan keuangan untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain yang tidak berkepentingan.)

5. Pengaruh Perilaku Profesional terhadap Kualitas Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Perilaku Profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Review Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat perilaku profesional yang dimiliki oleh aparat pengawas internal pemerintah, maka semakin baik pula kualitas pelaksanaan review laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian, perilaku profesional menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan secara efektif dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Perilaku profesional mencakup berbagai aspek, antara lain komitmen terhadap standar audit, kedisiplinan dalam bekerja, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, kemampuan menjaga sikap objektif, serta kemauan untuk terus meningkatkan kompetensi. Auditor yang memiliki perilaku profesional akan melaksanakan proses review secara sistematis, teliti, dan tidak asal-asalan. Hal ini berdampak langsung pada ketepatan temuan audit, keakuratan analisis, serta relevansi rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Secara teoretis, hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang menekankan pentingnya peran auditor sebagai mekanisme pengawasan dalam hubungan antara principal dan agent.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan: 1). Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Review Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat integritas yang dimiliki oleh aparat pengawas internal pemerintah, maka semakin baik pula kualitas pelaksanaan review laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, peningkatan integritas auditor atau aparat pengawas akan mendorong pelaksanaan proses review laporan keuangan yang lebih objektif, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. 2). Objektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Review Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat objektivitas yang dimiliki oleh aparat pengawas internal pemerintah, maka semakin baik pula kualitas pelaksanaan review laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, objektivitas yang tinggi akan mendorong aparat pengawas untuk melakukan penilaian laporan keuangan secara adil, independen, dan berdasarkan bukti yang memadai. 3). Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Review Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki oleh aparat pengawas internal pemerintah, maka semakin baik pula kualitas pelaksanaan review laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian, peningkatan kompetensi aparat pengawas akan mendukung pelaksanaan proses review laporan keuangan secara lebih profesional, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku. 4). Kerahasiaan Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Review Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik auditor dalam menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan, maka semakin baik pula kualitas pelaksanaan review laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian, kerahasiaan auditor menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga profesionalisme dan kredibilitas proses review laporan keuangan. Perilaku Profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Review Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat perilaku profesional yang dimiliki oleh aparat pengawas internal pemerintah, maka semakin baik pula kualitas pelaksanaan review laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian, perilaku profesional menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan secara efektif dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Referensi

1. Agoes, S. (2016). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
2. Akhmad Syarifudin. (2014). *Auditing: Teori dan praktik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
3. Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Pearson.
4. Mulyadi. (2014). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
5. Azhari, I., Rahayu, S., Junaid, A., & Tjan, J. S. (2020). Pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. *Invoice*, 2(2), 139-184. <https://doi.org/10.26618/inv.v2i2.4116>
6. Basri, H., Siregar, S. V., & Rahmatika, D. N. (2022). Independensi auditor dan kepercayaan publik terhadap kualitas audit. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 26(1), 1–15.
7. Belle, M., & Sartika, I. (2025). Implementasi E-Audit System pada Proses Review Laporan Keuangan UO TNI AD oleh APIP. *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, 5(8).
8. Budianto, A., & Firmansyah, A. (2025). Bagaimana Teknologi Informasi Memoderasi Pengaruh Kompetensi Auditor dan Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Audit. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 9(1), 313-325.
9. Charendra, I. M. (2017). Pengaruh independensi, profesionalisme, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. *Jurnal Akuntansi*.
10. Coram, P., Ng, J., & Woodliff, D. (2004). The effect of risk of misstatement on the propensity to commit reduced audit quality acts under time budget pressure. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 23(2), 159–167.
11. Dewi, L. S., Katuruni, I. S., & Rubianti, N. F. (2025). Pengaruh independensi auditor, pengalaman kerja auditor, kompetensi auditor dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 7(3).
12. Djatmiko, H., dkk. (2014). *Etika Profesi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
13. Ely, S., & Kurnia, S. (2013). *Etika Profesi Akuntansi*. Bandung: Alfabeta.
14. Estikawati, R. (2016). Pengaruh independensi dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
15. Griffin, R. W. (2002). *Management* (7th ed.). Boston: Houghton Mifflin Company.
16. Hajering, H., Su'un, M., & Muslim, M. (2023). Pengaruh Tekanan, Kompleksitas Tugas Dan Pengalaman Auditor Terhadap Audit Judgement. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(2), 262-278. https://scholar.google.com/citations?view_op
17. Halim, A. (2015). *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)* (Edisi 5). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
18. Hasan.Iqbal,2004, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara
19. Hasana, N. A., Mahdalena, M., & Badu, R. S. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Dimoderasi oleh Asistensi Keuangan. *Al-Buhuts*, 20(2).
20. Hermingsih, S. (2001). Pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap perilaku auditor. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 5(2), 123–138.
21. Ikatan Akuntan Indonesia. (1998). *Kode Etik Akuntan Indonesia*. Prosiding Kongres VIII IAI. Jakarta: IAI.
22. Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Kode Etik Akuntan Indonesia*. Jakarta: IAI.
23. Institute of Internal Auditors (IIA). (2006). *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (ISPPA)*. Altamonte Springs, FL: The Institute of Internal Auditors.
24. Kanita, N. P. S., Endiana, I. D. M., & Dewi, K. I. K. (2025). Pengaruh Profesionalisme, Integritas, Etika Profesi, Tekanan Waktu, dan Pengalaman Auditor terhadap Kinerja Auditor Eksternal pada KAP Wilayah Kota Denpasar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 7(2), 397-413.
25. Kasidi. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*.
26. Kusuma, H. (2012). Pengaruh Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 9(1), 1–15.
27. Makom, A. (2020). *Audit dan assurance services*. Jakarta: Salemba Empat.
28. Masnur, R. M., & Junaid, A. (2023). Pengaruh Beban Kerja, Task Specific Knowledge dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. *Center of Economic Students Journal*, 6(1), 31-43. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i1.567>
29. Mustika, I., Khadijah, K., Sumarman, B., Fauziah, S., & Nurbayanti, N. (2025). Independensi Auditor, Tekanan Anggaran Waktu Dan Kualitas Audit: Peran Moderasi Komitmen Organisasi Pada Kap Di Kepulauan Riau. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 9(4), 3177-3188.
30. Nabila, A. F., (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Menjadi Akuntan. *Perspektif Akuntansi*, 8(1), 14-32.
31. Natalia, E., & Suharnomo. (2015). Pengaruh jasa non-audit terhadap independensi auditor. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*.
32. Oktavia, D. (2019). Independensi auditor dan implikasinya terhadap kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi*.
33. Pangalingan, E., & Jaya, A. (2025). Analisis review laporan keuangan (LK) dalam menilai unit kerja di lingkup Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(2), 1239-1250.
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
36. Putri, R. D. (2022). Review laporan keuangan dan penerapan SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(1), 39-48.
37. Rahim, S., Rhamdani, R., & Wahyuni, N. (2021). Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Gender Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Center of Economic Students Journal*, 4(2), 172-180. https://scholar.google.com/citations?view_op
38. Russell, J. P. (2000). *The Quality Audit Handbook*. Milwaukee: ASQ Quality Press.
39. Santoso, T. M. M. (2024). *Pengaruh Kompetensi SDM Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Di Inspektorat Kabupaten Jepara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

40. Saputri, B. D. M., & Su'un, M. (2022). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Kecerdasan Emosional sebagai Variabel Moderasi Pada KAP Kota Makassar. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(3), 198-209. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i3.411>
41. Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (7th ed.). Toronto: Pearson Education.
42. Sigit, A. (2012). *Profesionalisme dan Etika Profesi Akuntan*. Yogyakarta: BPFE.
43. Subiyantoro, S. (2025). Dampak karakteristik tim audit, independensi, kompetensi dan fee audit terhadap kualitas audit: Dampak mediasi proses audit efektif. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 205-226.
44. Sufren. 2013. *Mahir Menggunakan SPSS Secara Otodidak*. Jakarta: Kompas Gramedia
45. Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
46. Sujarweni. 2016. *Kupas Tuntas, Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
47. Sunarto. (2003). *Etika Profesi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
48. Sunyoto. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Jakarta: CAPS
49. Trisnainingsih, T. (2024). Independensi Auditor Dan Pemahaman Good Governance , Gaya Kepemimpin. Simposium Nasional Akuntansi X.
50. Widayarni, E. (2015). Pengaruh tekanan waktu dan kompetensi terhadap kualitas review laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, X(X), xx-xx.
51. Alfiansyah, & Priono. (2024). Implementasi SIKADEKA dalam Meningkatkan Efektivitas Audit Dana Kampanye Pemilu 2024 pada Partai Politik Kota X. *Kampus Akademi Publishing*, 2(7), 615 – 623.
52. Arodhiskara, Y., Mas'ud, M., Su'un, M., & Mursalim. (2021). The influence of Tudang Sipulung, public accountability, and transparency to the regional budget performance of the municipality of Parepare. *Management Science Letters*, 11(1), 49–56.
53. Aryana, I., et al. (2025). Tinjauan Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu 2024 pada Partai Gerakan Indonesia Raya. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, 5(1), 83 – 92.
54. Astuthy, R. T., Tenriwaru, T., & Selong, A. (2025). Peran Informasi Akuntansi Sebagai Alat Bantu dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemda Kab. Pulau Taliabu. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(4), 571–582. <https://doi.org/10.37531/celeb.v1i2.292>
55. Atmadja, A. T. (2013). Pergulatan Metodologi dan Penelitian Kualitatif dalam Ranah Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 3(2), 122–141.
56. Bahtiar, R. A. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Pengungkapan Dana Kampanye Pemilu. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 16(2), 6-10.
57. Bovens, M. (2018). Public accountability. In E. Ongaro & S. Van Thiel (Eds.), *The Palgrave handbook of public administration and management in Europe* (pp. 15–33). Palgrave Macmillan.
58. Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Prenada Media.
59. Burgam, D. (2016). Best Practices for Campaign Finance Disclosure. The National Institute on Money in State Politics.
60. Chandranegara, I. S., S. Bakhri, dan N. Sahputra Umara. "Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai Pencegahan Investasi Politik yang Koruptif." *Mimbar Hukum* 32, no. 1 (2020): 30–54. Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai komunikasi politik: Esensi dan strategi dalam pemilu. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 5–16.
61. Galuh Cahya Nusantara. (2019). *Sistem Pelaporan Dana Kampanye Berbasis Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas*. Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu, 115-132.
62. Grimmeliikhuijsen, S., & Feeney, M. K. (2017). Developing and testing an integrative framework for open government adoption in local governments. *Public Administration Review*, 77(4), 579–590.
63. Hafild. (2008). *Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik*.
64. Hamdani. (2024). Evaluasi Ketaatan dan Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6(2), 527–539.
65. [Hasil Audit Dana Kampanye Paslon Bupati Sinjai: Ramah Terbanyak, Santun-Berakarmi Tak Patuh - Majesty.co.id.](https://berita.news/2024/12/14/laporan-dana-kampanye-paslon-bupati-dan-wabup-di-pilkada-sinjai-ramah-terbanyak/)
66. [https://berita.news/2024/12/14/laporan-dana-kampanye-paslon-bupati-dan-wabup-di-pilkada-sinjai-ramah-terbanyak/.](https://berita.news/2024/12/14/laporan-dana-kampanye-paslon-bupati-dan-wabup-di-pilkada-sinjai-ramah-terbanyak/)
67. Imawan, R., & Nawangsari, E. (2025). *Pelaporan Dana Kampanye Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2024*.
68. Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE.
69. Irlandi, R. (2024). Strengthening transparency of political party financial reports to prevent illegal fundraising. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 211–224.
70. Kusmarti, P., Suwardi, S., & Sardjono, H. S. (2023). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(2), 102–111.
71. Maharani, E. N., Akbar, A. M., Maheswari, J. L., & Suwarsit. (2024). Penerapan good corporate governance dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 2(4), 384–393.
72. Maulidiyah, N., & Darmo, D. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan terhadap Kepercayaan Donatur di Yayasan Sosial Keagamaan. *Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan*, 1(1), 1–8.
73. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. SAGE.
74. Motik, S. S. (2003). *Transparansi & Akuntabilitas dan Minat Berinvestasi*. *Jurnal Forum Inovasi Capacity Building & Good Governance*, 8 (September–November 2003).
75. Muhammad Sigro, & Rizdina. (2024). Analisis Kepatuhan dan Akuntabilitas atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Partai Politik X 2024, 1(3), 57-65.
76. Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 15(1), 127–138.
77. Musfirah B., Syamsu Alam, Musliha Shaleh, & Fifi Nurafifah Ibrahim. (2023). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Menunjang Pembangunan Pedesaan*. *Center of Economic Students Journal*, 6(2), 141-155. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i2.579>
78. Musri, M., Ahmad, R., & Putra, A. (2024). E-government and transparency in public sector reporting. *Journal of Public Administration*, 12(2), 45–60.
79. Ndaomanu, B., & Davianti. (2024). Akuntabilitas Melalui Transparansi dalam Perspektif Joko Widodo, Perspektif Akuntansi, 7(3), 268 – 283.
80. Ngakil, N., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa di Kabupaten Wonosobo, *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 3(2), 92 – 107.

81. Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Pencegahan Investasi Politik Yang Koruptif. *Jurnal Mimbar Hukum*, 32(1), 30-54.
82. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu.
83. Piani, I. (2021). Transparansi dan Kepentingan Umum. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 45–52.
84. PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pelaporan Dana Kampanye.
85. Priono, A., & Windiarta, I. G. (2024). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 12(1), 45–56.
86. Rahmat, Puput Saeful, (2009). "Penelitian Kualitatif." *Jurnal Equilibrium*, 5 (9).
87. Rahmatika, S. (2021). Good governance partai politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik*, 4(2), 101–115.
88. Rizky, R., et al. (2025). Pemanfaatan E-Government untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik, *NETWORK : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi dan Komputer Sains*, 1(1), 20 – 29.
89. Ruijter, E., Grimmelikhuijsen, S., & Meijer, A. (2020). Open data for democracy: Developing a theoretical framework for open data use. *Government Information Quarterly*, 37(1)
90. Safitri, E., Amiruddin, A., Selong, A., Tenriwaru, & Basalamah, M. S. A. (2023). Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Center of Economic Students Journal*, 6(1), 22–30. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i1.521>
91. Setiawan, H. B. (2023). Optimalisasi laporan dana kampanye untuk akuntabilitas. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 7(1), 55–68.
92. Suun, M., Tenriwaru, T., & Rahim, S. (2022). Merancang Sistem Informasi Akuntansi dan Digitalisasi Laporan Keuangan untuk Pengelolaan Dana Desa. *Celebes Journal of Community Services*, 1(2), 44–50. <https://doi.org/10.37531/celeb.v1i2.292>.
93. Yahya, A. A., Silvana Putri Priageng, & Lia Wulandari. (2025). Transparansi Dana Kampanye Politik Dalam Menjamin Kepercayaan Publik: Studi Kasus Pemilu 2024. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 7(11), 61–70.